

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI INTERVENING

Moch. Putra Dwigantara
mpdwigantara@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of capital expenditure on performance growth of local finance with Local-owned Source Revenue as intervening variable. While, performance growth of local finance was measured by local independence, local mobilization, fiscal decentralization grade, local finance dependance, local effectiveness and its growth ratio of Local-owned Source Revenue. The population was 29 districts and 9 cities in East Java. Moreover, the research was quantitative. Furthermore, the instrument used sensus. Additionally, the data were secondary which taken from Budget Realization Report of Local Budget during 2014-2018. In addition, the data analysis technique used Partial Least Square with significant rate of 5% and using WarpPls 6.0. The research result concluded capital expenditure had positive effect on Local-owned Source Revenue. Likewise, Local-owned Source Revenue had positive effect on performance growth of local finance. On the other, capital expenditure had negative effect on performance growth of local finance.

Keywords: capital expenditure, local-owned source revenue, finance performance, budget realization report

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Pertumbuhan kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio kemandirian daerah, rasio kemampuan mobilisasi daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas daerah dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Objek dari penelitian ini adalah 29 Kabupaten dan 9 Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penentuan sampel dilakukan dengan metode sensus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun 2014 hingga tahun 2018. Data diuji dengan menggunakan pengujian Partial Least Square dengan tingkat signifikansi 5% dan menggunakan bantuan software WarpPLS 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Kata kunci : belanja modal, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan, laporan realisasi anggaran

PENDAHULUAN

Terpilihnya Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang ketujuh, periode Tahun 2014-2019 membawa dampak tersendiri bagi pembangunan nasional. Membawa visi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, membuat Pemerintah fokus meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur yang komprehensif tersebut bertujuan untuk menciptakan konektivitas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berupaya untuk mengamankan proses percepatan pembangunan

nasional. Sejalan dengan hal tersebut, percepatan pembangunan infrastruktur memicu Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan guna menunjang akses infrastruktur nasional di daerah. Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah ini sebagai wujud dari bentuk otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah berhak untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk peningkatan kapasitas dalam menjalankan pemerintahannya serta mendukung adanya percepatan pembangunan infrastruktur nasional harus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang tepat sasaran dan tepat guna perlu diutamakan demi tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam hal ini pembangunan infrastruktur dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dialokasikan pada pos belanja modal. Melalui belanja modal, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan seberapa besar pembangunan yang ingin dilakukan. Semakin besar belanja modal yang dianggarkan semakin besar pula aset yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Bertambahnya aset tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, konektivitas, serta pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu dengan adanya belanja modal, Pemerintah Daerah mampu menarik investor untuk melakukan investasi akibat tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta lapangan pekerjaan yang baru. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Seiring berkembangnya pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur suatu daerah membuat kemandirian daerah, khususnya kemandirian dalam hal keuangan dapat tercapai. Semakin banyak investor yang masuk, semakin banyak pula aliran dana investasi yang masuk ke daerah. Hal ini dapat berdampak bagi kemandirian keuangan daerah, salah satu tolak ukur kemandirian keuangan daerah yaitu melalui pendapatan asli daerah. Peningkatan kemandirian keuangan daerah terlihat dari seberapa besar pendapatan asli daerahnya tumbuh. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan murni yang diperoleh daerah tanpa bantuan Pemerintah Pusat. Kemampuan Pemerintah Daerah untuk mampu mendanai kegiatan-kegiatannya sendiri tanpa adanya bantuan atau transfer dari Pemerintah Pusat terlihat pada jumlah pendapatan asli daerah yang dimilikinya. Kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan suatu daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kualitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu ukuran kinerja Pemerintah Daerah yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Semakin baik kinerja keuangan suatu daerah maka kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah semakin baik. Selain itu kemampuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar kaitannya terhadap kinerja keuangan suatu Pemerintah Daerah. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kredibel dan akuntabel dapat mewakili kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang baik. Kemampuan mengidentifikasi perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun merupakan salah satu langkah perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004: 148).

Analisis rasio keuangan kerap digunakan secara luas pada sektor privat, sedangkan pada sektor publik sangatlah terbatas. Penggunaan rasio keuangan sangat membantu dalam

proses pengambilan keputusan. Dalam sektor publik, analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Pertumbuhan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat diketahui melalui analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Hal ini sangat penting mengingat bahwa pertumbuhan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat menggambarkan kondisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah. Kinerja keuangan daerah yang tumbuh dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu prestasi yang dapat dibanggakan dimana dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

Pertumbuhan kinerja keuangan yang terjadi akibat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun sangatlah penting untuk diawasi. Kinerja keuangan daerah yang dapat dinilai menggunakan analisis rasio keuangan daerah tidak terlepas dari peran komponen-komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja modal yang mewakili kegiatan pembangunan suatu daerah merupakan salah satu komponen yang penting pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Selain itu pendapatan asli daerah yang mewakili sumber penerimaan suatu daerah juga merupakan salah satu komponen penting pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diharapkan mampu menggenjot pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Namun pada kenyataannya masih banyak pelaksanaan belanja modal yang tidak tepat guna. Pembangunan infrastruktur yang terkesan hanya untuk pelaksanaan penyerapan anggaran tidak mampu memberikan dampak secara langsung pada pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Selain itu lamanya proyek pembangunan juga memiliki andil. Pembangunan yang lebih dari satu tahun sehingga dampak ekonomisnya baru dinikmati di tahun mendatang juga mampu mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Serta yang tidak kalah penting adalah masih adanya Pemerintah Daerah yang kurang memperhatikan pengelolaan aset khususnya dalam pemeliharaan. Pendapatan asli daerah yang diharapkan menopang pendapatan suatu daerah untuk mencapai kemandirian, di beberapa daerah belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Beberapa daerah masih atau bahkan sangat mengandalkan dana transfer baik itu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kinerja keuangan suatu daerah terlepas adanya perbedaan potensi daerah, kemampuan serta kualitas pemerintahannya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?, (2) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah?, (3) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah? Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah, (2) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah, (3) Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Postur APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Setiap tahunnya Pemerintah

Daerah melalui Peraturan Daerah menetapkan APBD sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah harus tercatat di APBD dengan tepat. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit maupun surplus Pemerintah Daerah wajib mencatat hal tersebut di APBD dengan jelas. Pemerintah daerah harus menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit pada APBD. Begitu pula jika terjadi surplus, penggunaan surplus tersebut harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada APBD.

APBD harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Melalui APBD, Pemerintah Daerah mampu menjalankan otonomi daerah sebagai bentuk pelaksanaan tugas desentralisasi. Menurut Mardiasmo (2012:103) APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. APBD juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hal daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan asli daerah, (2) Pendapatan transfer, (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh atau dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu: (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (b) Jasa giro, (c) Pendapatan bunga, (d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Klasifikasi belanja daerah terdiri dari: (1) Belanja operasi, (2) Belanja modal, (3) Belanja tidak terduga, (4) Belanja transfer.

Belanja Modal

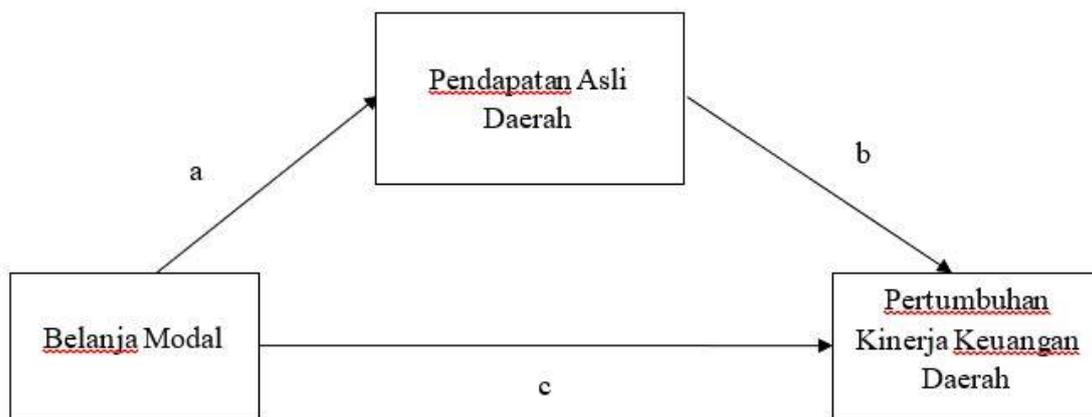
Menurut Arif *et al* (2010:188), belanja modal adalah belanja yang tidak habis satu tahun dan menghasilkan aset tetap pemerintah. Menghasilkan aset tetap pemerintah termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal terdiri dari: (1) Belanja tanah, (2) Belanja peralatan dan mesin, (3) Belanja bangunan dan gedung, (4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, (5) Belanja aset tetap lainnya, (6) Belanja aset lainnya.

Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Keuangan daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai dampak dari tugas desentralisasi. Pengelolaan keuangan daerah ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Semakin baik pengelolaan keuangan daerah semakin baik pula kinerja keuangan daerahnya. Selain itu pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan mampu membawa kemandirian suatu daerah dalam menghimpun dan menggunakan keuangan daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk pengawasan serta evaluasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah terhadap penggunaan APBD. Menurut Halim (2004:126) analisis rasio keuangan daerah terhadap APBD bertujuan untuk: (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, (2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, (3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatannya, (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, (5)Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Belanja modal yang tepat guna dan tepat sasaran mampu membawa sumber -sumber penerimaan daerah yang baru. Banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal dapat menambah sarana prasarana serta peningkatan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur terkait perbaikan maupun peningkatan yang mumpuni memiliki daya tarik tersendiri bagi investor. Investasi akan masuk, tercipta lapangan kerja baru dan produktivitas daerah akan meningkat. Seiring dengan masuknya investasi pada daerah membuat daerah memiliki penambahan objek pendapatan asli daerah.

Peningkatan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan daerah mampu memicu terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sarana prasarana yang tepat guna

mendorong Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini membuat masyarakat percaya kepada Pemerintah Daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya penerimaan daerah. Hal ini dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian Darwanis dan Saputra (2014) memberikan bukti bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan angka positif, yang berarti bahwa semakin besar Belanja Modal yang dibelanjakan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Amrozi (2016) juga memberikan bukti bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan meningkatnya Belanja Modal berarti Pemerintah telah meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga akan meningkatkan produktifitas masyarakat dan menarik investor yang nantinya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

H₁: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah..

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah

Mengoptimalkan serta menggali potensi pendapatan asli daerah merupakan tugas yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah yang optimal mampu meminimalkan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menimbulkan suatu kemandirian bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Kemandirian pengelolaan keuangan daerah akibat dari meningkatnya pendapatan asli daerah juga mendorong terjadinya pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri seluruh kegiatannya membuat kinerja keuangan daerah semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, menurut penelitian Antari dan Sedana (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut memberi indikasi bahwa pendapatan asli daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

H₂: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah

Peningkatan sarana dan prasarana pada Pemerintah Daerah mampu meningkatkan produktivitas kinerja. Penambahan maupun perbaikan sarana prasarana membuat Pemerintah Daerah lebih mudah dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudahan dalam pelaksanaan tugas ini membuat kinerja pemerintah di segala aspek meningkat. Salah satunya adalah kinerja keuangan daerah. Selain itu pembangunan infrastruktur yang memadai mampu menimbulkan sumber-sumber penerimaan daerah yang baru. Hal tersebut dapat memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dimana diiringi dengan pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian Astiti dan Mimba (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Kemampuan Pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja modal mendorong terjadinya pembangunan dan pertumbuhan produktivitas ekonomi. Dengan adanya pembangunan yang tepat serta produktivitas ekonomi daerah yang meningkat, maka Pemerintah Daerah dapat dikatakan telah mengelola keuangan daerahnya dengan baik.

H₃: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori yang telah berlaku selama ini apakah benar atau salah (Sarmanu, 2017: 2). Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian korelasional. Penelitian korelasional ialah penelitian yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya korelasi antar variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sensus. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaporkan oleh 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur dalam rentang waktu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini merupakan belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Variabel independen belanja modal ini dapat diukur menggunakan perhitungan:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah terhadap penggunaan APBD. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan pertumbuhan. Menurut Halim (2004:126) analisis rasio keuangan daerah terhadap APBD bertujuan untuk: (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, (2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, (3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, (5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Oleh karena itu pengukuran variabel dependen berupa pertumbuhan kinerja keuangan ini menggunakan 6 rasio yaitu:

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menggambarkan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri pengeluarannya. Rasio kemandirian daerah dapat dihitung dengan cara

membandingkan pendapatan asli suatu daerah dengan jumlah pendapatan transfer daerah pemerintahan pusat serta pinjaman daerah. Rumus dari rasio kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah

Kemampuan mobilisasi daerah menggambarkan seberapa besar upaya pemerintah daerah untuk memacu potensi daerahnya dalam rangka memenuhi pembiayaan daerah. Kemampuan mobilisasi daerah dapat diukur dengan rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Rumus dari kemampuan mobilisasi daerah adalah:

$$\text{Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Adapun besaran rasio derajat desentralisasi fiskal dapat diperoleh dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Rumus dari rasio derajat desentralisasi fiskal adalah:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan seberapa besar peran pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah atau dengan kata lain seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Besaran rasio ketergantungan keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Rumus rasio ketergantungan keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan. Rumus dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD } x_n - \text{Realisasi PAD } x_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } x_{n-1}} \times 100\%$$

Variabel Intervening

Variabel intervening pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh atau dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Variabel intervening pendapatan asli daerah ini dapat diukur menggunakan perhitungan:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013: 19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. Selain itu statistik deskriptif digunakan juga untuk menggambarkan profit data dan sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

Partial Least Square

Menurut Ghozali dan Latan (2017:03) *Partial Least Square* merupakan metoda alternatif untuk model persamaan struktural yaitu untuk menguji secara simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linear maupun non-linear dengan banyak indikator. Model PLS digunakan atas pertimbangan adanya hubungan kausalitas antar variabel independen dan dependen apabila salah satu variabel atau keduanya memiliki satu atau lebih indikator dan benar-benar mengukur variabel bukan indikator, Selain itu model PLS juga cocok digunakan pada model yang dibangun terdapat hubungan kausalitas berjenjang yang ditandai dengan adanya variabel intervening yang menjadi variabel penghubung antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan *software* WarpPLS versi 6.0. WarpPLS merupakan *software* model persamaan struktural yang canggih untuk mengidentifikasi hubungan linear maupun non-linear antar variabel dengan nilai koefisien jalur yang sesuai.

Uji Outer Model

Evaluasi model pengukuran atau *outer* model dilakukan untuk menilai reliabilitas dan validitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten dimana indikator-indikator tersebut dibagi menjadi dua yaitu indikator refleksif dan indikator formatif. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan hanyalah indikator refleksif. Menurut Ghozali dan Latan (2017:14) indikator refleksif atau sering disebut dengan Mode A merupakan indikator yang bersifat manifestasi terhadap konstruk dengan arah hubungan dari konstruk ke indikator karena diasumsikan memiliki domain konten yang sama dan menghilangkan satu indikator tidak akan mengubah makna konstruk.

Evaluasi model pengukuran atau *outer* model dengan indikator refleksif dalam PLS dapat dimulai dengan melihat nilai *indicator reliability* (reliabilitas indikator) yaitu besarnya variance dari indikator untuk menjelaskan konstruk laten. Ukuran yang digunakan untuk mengukur reliabilitas indikator tersebut dengan melihat nilai faktor loading tiap indikator. Menurut Ghozali dan Latan (2017:87) *Rule of thumb* yang biasa digunakan untuk menilai faktor loading yaitu harus lebih besar 0,70 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai

loading faktor antara 0,60 - 0,70 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory*.

Pengujian reliabilitas dalam uji outer model dimaksudkan untuk menguji apakah item/indikator dari instrumen dapat digunakan untuk melakukan pengukuran lebih dari dua kali dengan hasil yang akurat. Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan nilai *composite reliability*. Menurut Ghazali dan Latan (2017:87) *Rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu harus lebih besar dari 0,70 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai 0,60 - 0,70 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory*.

Selain itu dalam uji outer model juga terdapat pengujian validitas. Pengujian validitas dimaksudkan untuk menguji apakah item/indikator yang merepresentasikan konstruk laten valid atau tidak dalam artian dapat menjelaskan konstruk laten untuk diukur. Uji validitas diukur dengan menggunakan nilai *average variance extracted*. Menurut Ghazali dan Latan (2017:88) nilai *average variance extracted* direkomendasikan harus lebih dari 0,50 atau dengan kata lain 50% atau lebih *variance* dari indikator dapat dapat dijelaskan.

Uji Inner Model

Model struktural atau inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Pengukuran inner model dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh hubungan antar variabel, serta tingkat pengaruh hubungan keseluruhan variabel dalam sistem yang dibangun. Model struktural atau inner model dinilai dengan melihat besarnya nilai *Adjusted R-squared* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari inner model serta mengurangi adanya bias estimasi. Menurut Ghazali dan Latan (2017:92) nilai *Adjusted R-squared* 0,70, 0,45, dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, menengah dan lemah. Semakin besar nilai ini, menunjukkan bahwa prediktor model semakin baik dalam menjelaskan *variance*.

Disamping melihat besarnya nilai *Adjusted R-squared*, evaluasi inner model dapat dilakukan dengan *Q-squared* atau sering disebut juga dengan *predictive sample reuse*. *Q-squared* digunakan untuk mengetahui apakah model mempunyai *predictive relevance* atau tidak. Menurut Ghazali dan Latan (2017:94) Nilai *Q-squared* > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai *predictive relevance*, sedangkan nilai *Q-squared* < 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*.

Uji Model Fit

Selain pengujian model pengukuran atau outer model dan model struktural atau inner model dalam PLS juga membutuhkan evaluasi fit model. Pengujian model fit bertujuan untuk menemukan suatu model yang fit dengan data originalnya sehingga dapat menemukan kualitas model. Terdapat 10 (sepuluh) ukuran fit model pada software WarpPLS 6.0, namun pada penelitian ini hanya empat ukuran fit model yang digunakan. Keempat ukuran fit model tersebut antara lain *Average Path Coefficient* (APC), *Average R-Squared* (ARS), *Average Adjusted R-Squared* (AARS), dan *Average Block Variance Inflation* (AVIF).

APC, ARS, dan AARS mengukur rata-rata nilai path koefisien, *R-squared* dan *Adjusted R-squared* yang dihasilkan dalam model. Sedangkan AVIF ukuran fit model yang digunakan untuk menguji masalah *collinearity* di dalam model PLS. Menurut Ghazali dan Latan (2017:95) nilai *p-value* untuk APC, ARS, dan AARS yang direkomendasikan sebagai indikasi model fit adalah $\leq 0,05$ dengan level signifikansi yang digunakan adalah 5%. Sedangkan untuk AVIF idealnya nilai yang direkomendasikan untuk kedua ukuran tersebut harus $\leq 3,3$ namun nilai $\leq 5,5$ masih dapat diterima.

Uji Hipotesis

Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka diperlukan adanya pengujian hipotesis yang telah dirancang yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel. Uji hipotesis t untuk menilai pengaruh variabel independen secara terpisah dengan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% dan batas ketidakakuratan sebesar (α) = 5% sehingga:

- a) Jika nilai *p value* > α , maka H_0 ditolak
- b) Jika nilai *p value* < α , maka H_0 diterima

Sedangkan untuk menguji pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi atau intervening dilakukan dengan melakukan estimasi *indirect effect*. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengetahui ada atau tidaknya efek mediasi yaitu ada hubungan yang signifikan antara variabel prediktor dan mediator, adanya hubungan signifikan antara variabel mediator dan criterion, dan hubungan antara variabel prediktor dan criterion. Selanjutnya menghitung *Variance Accounted For (VAF)* dengan rumus sebagai berikut:

$$VAF = \frac{\text{pengaruh tidak langsung (indirect effect)}}{\text{pengaruh total (total effect)}} \times 100\%$$

Menurut Ghozali dan Latan (2017:216) nilai VAF berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai VAF menunjukkan bahwa pengaruh efek mediasi yang sempurna. Pengambilan simpulan tentang mediasi yaitu jika VAF > 80% maka menunjukkan variabel mediasi penuh. Jika VAF bernilai antar 20%-80%, maka dapat dikategorikan sebagai mediasi parsial. Sedangkan jika VAF < 20% maka dapat disimpulkan bahwa hampir tidak ada efek mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel yaitu Belanja Modal (BM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah yang diwakili oleh Rasio Kemandirian Daerah (PKKD-RKD), Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah (PKKD-RKMD), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (PKKD-RDDF), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (PKKD-RKKD), Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PKKD-REPAD), dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PKKD-RPPAD).

Tabel 1
Deskripsi Hasil Penelitian Variabel Penelitian Tahun 2014-2018

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	190	74,291,701,183	2,517,891,658,246	423,277,739,049	317,819,190,352
PAD	190	80,493,920,959	5,161,844,571,172	426,547,411,663	694,628,994,283
PKKD-RKD	190	9.26	170.15	24.30742105	22.9644096
PKKD-RKMD	190	8.49	87.29	31.50152632	18.26484098
PKKD-RDDF	190	7.91	64.25	16.926	9.792523052
PKKD-RKKD	190	20.92	204.92	64.04563158	13.86979045
PKKD-REPAD	190	77.35	204.63	127.1592632	20.66929447
PKKD-RPPAD	190	-38.79	97.62	20.37857895	25.33094365

Sumber: data LRA 38 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1, sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 29 Kabupaten dan 9 Kota. Jumlah sampel

pengamatan mulai tahun 2014 sampai 2018 berjumlah 190 sampel penelitian. Adapun hasil statistik deskriptif menggambarkan bahwa Nilai terkecil untuk variabel Belanja Modal (BM) selama tahun 2014-2018 sebesar Rp 74.291.701.183, sedangkan untuk nilai terbesar yaitu sebesar Rp 2.517.891.658.246. Nilai rata-rata untuk variabel Belanja Modal selama tahun 2014-2018 yaitu sebesar Rp 423.277.739 dan standar deviasi sebesar Rp 317.819.190. Nilai terkecil untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2014-2018 sebesar Rp 80.493.920.959, sedangkan untuk nilai terbesar yaitu sebesar Rp 5.161.844.571.172. Nilai rata-rata variabel Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2014-2018 yaitu sebesar Rp 426.547.411.663 dan standar deviasi sebesar Rp 694.628.994.283.

Rasio Kemandirian Daerah terkecil dengan nilai 9,26%, sedangkan yang terbesar dengan nilai 170,15%. Adapun nilai rata-rata Rasio Kemandirian Daerah selama tahun 2014-2018 sebesar 24,31% dan standar deviasi sebesar 22,96%. Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah terkecil dengan nilai 8,49%, sedangkan yang terbesar dengan nilai 87,29%. Adapun nilai rata-rata Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah selama tahun 2014-2018 sebesar 31,50% dan standar deviasi sebesar 18,26%. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terkecil dengan nilai 7,91%, sedangkan yang terbesar dengan nilai 64,25%. Adapun nilai rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama tahun 2014-2018 sebesar 16,93% dan standar deviasi sebesar 9,79%. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terkecil dengan nilai 20,92%, sedangkan yang terbesar dengan nilai 204,92%. Adapun nilai rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah selama tahun 2014-2018 sebesar 64,04% dan standar deviasi sebesar 13,87%. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terkecil dengan nilai 77,35%, sedangkan yang terbesar dengan nilai 204,63%. Adapun nilai rata-rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2014-2018 sebesar 127,16% dan standar deviasi sebesar 20,67%. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terkecil dengan nilai -38,79%, sedangkan yang terbesar dengan nilai 97,62%. Adapun nilai rata-rata untuk Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2014-2018 sebesar 20,38% dan standar deviasi sebesar 25,33%.

Pengujian Outer Model

Uji Validitas Konvergen

Penelitian ini menggunakan indikator reflektif dimana dalam pengujian outer model atau bisa disebut model pengukuran dapat dimulai dengan melihat nilai indicator reliability dengan menggunakan ukuran nilai faktor loading. Nilai faktor loading harus lebih besar dari 0.7 akan tetapi nilai faktor loading antara 0.6-0.7 masih dapat diterima (Ghozali dan Latan, 2017:87). Berikut hasil uji loading factor masing-masing variabel penelitian:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Konvergen Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Nilai Loading	P-value	Keterangan
Belanja Modal	BM	1.000	<0.001	Diterima
Pendapatan Asli Daerah	PAD	1.000	<0.001	Diterima
	PKKD-RKD	0.962	<0.001	Diterima
	PKKD-RKMD	0.749	<0.001	Diterima
Pertumbuhan Kinerja	PKKD-RDDF	0.916	<0.001	Diterima
Keuangan Daerah	PKKD-RKKD	-0.639	<0.001	Tidak Diterima
	PKKD-REPAD	-0.275	<0.001	Tidak Diterima
	PKKD-RPPAD	-0.138	0.020	Tidak Diterima

Sumber: data LRA 38 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diolah, 2020

Hasil pengujian *loading factor* menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator pada variabel Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah yang tidak memenuhi uji faktor loading karena bernilai dibawah 0.7 yaitu indikator PKKD-RKKD dengan nilai faktor loading -0.639, indikator PKKD-REPAD dengan nilai faktor loading -0.275, dan indikator PKKD-RPPAD dengan nilai faktor loading -0.138. Sehingga indikator tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat untuk mewakili variabel Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. Oleh karena itu indikator-indikator tersebut perlu dieliminasi atau dihapus dari model.

Setelah menghapus indikator-indikator yang tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan uji loading factor ulang. Untuk uji loading factor kali ini variabel Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah hanya menggunakan tiga indikator saja yaitu indikator PKKD-RKD, PKKD-RKMD, dan PKKD-RDDF. Sedangkan indikator PKKD-RKKD, PKKD-REPAD, dan PKKD-RPPAD dieliminasi atau dihapus karena memiliki nilai factor loading rendah. Adapun hasil pengujian loading factor dengan menghapuskan tiga indikator tersebut dapat kita lihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Konvergen Ulang Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Nilai Loading	P-values	Keterangan
Belanja Modal	BM	1.000	<0.001	Diterima
Pendapatan Asli Daerah	PAD	1.000	<0.001	Diterima
Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah	PKKD-RKD	0.961	<0.001	Diterima
	PKKD-RKMD	0.746	<0.001	Diterima
	PKKD-RDDF	0.967	<0.001	Diterima

Sumber: data LRA 38 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diolah, 2020

Dari hasil pengujian ulang uji loading factor diatas dapat diketahui bahwa seluruh indikator memiliki nilai *loading factor* diatas 0.7 dan memiliki P-values < 0.0001, sehingga seluruh indikator setelah dilakukan modifikasi dapat dikatakan valid dan dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah indikator/item dari instrumen dapat digunakan untuk melakukan pengukuran lebih dari dua kali dengan hasil yang akurat. Nilai yang digunakan adalah nilai *composite reliability coefficients*. Dimana nilai *composite reliability coefficients* lebih dari 0.7 dikatakan reliabel, namun jika nilai *composite reliability coefficients* antara 0.6-0.7 dapat diterima (Ghozali dan Latan, 2017:87). Untuk pengujian reliabilitas ini indikator yang digunakan dalam variabel Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah menjadi tiga indikator saja yaitu PKKD-RKD, PKKD-RKMD, dan PKKD-RDDF karena indikator lainnya tidak memenuhi uji faktor loading. Adapun hasil pengujian reliabilitas masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

<i>Composite Reliability</i>		
<i>Coefficients</i>		
BM	PAD	PKKD
1.000	1.000	0.924
<i>Cronbach's Alpha</i>		
<i>Coefficients</i>		
BM	PAD	PKKD
1.000	1.000	0.878

Sumber: data LRA 38 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diolah, 2020

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *composite reliability coefficients* diatas 0.7, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel beserta item/indikatornya reliabel.

Uji Validitas Konstruk

Uji validitas pada pengujian outer model digunakan untuk menguji apakah item/indikator yang merepresentasikan konstruk laten valid atau tidak dalam artian dapat menjelaskan konstruk laten untuk dapat diukur. Nilai yang digunakan adalah nilai *average variance extracted*. Dengan nilai *average variance extracted* yang direkomendasikan harus lebih dari 0,5 (Ghozali dan Latan, 2017:88). Berikut hasil pengujian validitas masing-masing variabel penelitian:

Tabel 5
Hasil Uji Validitas

<i>Average Variance Extracted</i>		
BM	PAD	PKKD
1.000	1.000	0.805

Sumber: data LRA 38 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diolah, 2020

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *average variance extracted* diatas 0,5, sehingga seluruh variabel konstruk tersebut memiliki validitas yang baik.

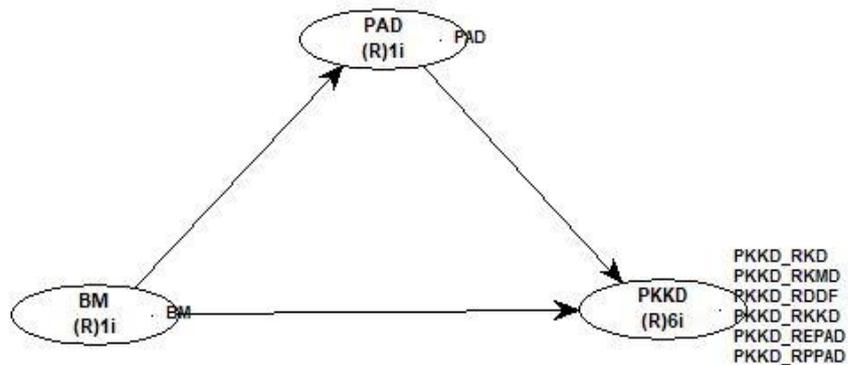
Pengujian Inner Model

Setelah melalui pengujian pengukuran atau outer model, pengujian selanjutnya merupakan pengujian inner model atau pengujian model struktural. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh hubungan antar variabel. Uji inner model dinilai dengan melihat besarnya nilai *Adjusted R-squared* untuk setiap variabel endogen sebagai kekuatan prediksi serta mengurangi bias estimasi, serta melihat nilai *Q-squared* yang digunakan untuk mengetahui apakah model memiliki *predictive relevance* atau tidak.

Struktur model awal penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. Model awal penelitian ini khusus variabel Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah (PKKD) terdiri dari enam indikator. Setelah dilakukan pengujian outer model maka struktur model dimodifikasi dengan mengeliminasi tiga indikator pada variabel Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah sehingga struktur model akhir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan struktur model akhir tersebut maka dilakukan pengujian inner model dan dapat diperoleh hasilnya yang dapat dilihat pada Gambar 3. Pengujian inner model ini digunakan juga untuk menguji hipotesis penelitian.

Adapun untuk hasil nilai *Adjusted R-squared* serta nilai *Q-squared* dapat dilihat pada Tabel 6. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-squared* untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.804 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel

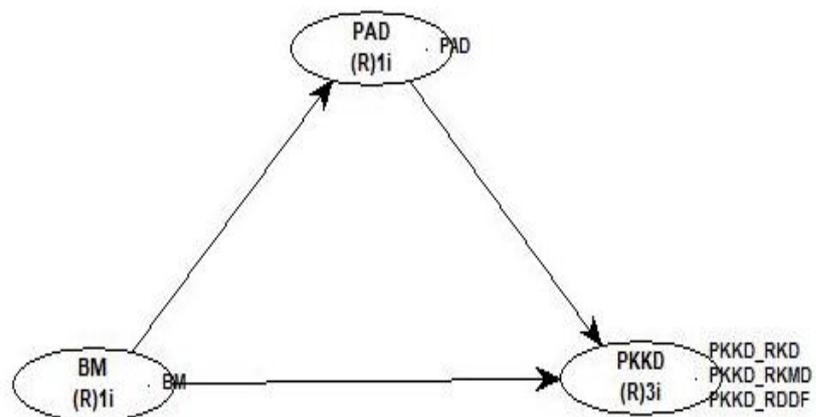
Belanja Modal (BM) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 80,4%, nilai ini termasuk dalam kategori kuat. Sedangkan nilai *Adjusted R-squared* untuk variabel Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah (PKKD) sebesar 0.839 dimana memiliki arti bahwa pengaruh variabel Belanja Modal (BM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menjelaskan variasi variabel criterion adalah sebesar 83,9% dan sisanya 16,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai *Adjusted R-squared* tersebut termasuk dalam kategori kuat. Untuk nilai *Q-squared* yang dihasilkan oleh variabel endogen adalah lebih besar dari 0 yang berarti bahwa model mempunyai predictive relevance.



Gambar 2

Struktur Model Awal Penelitian

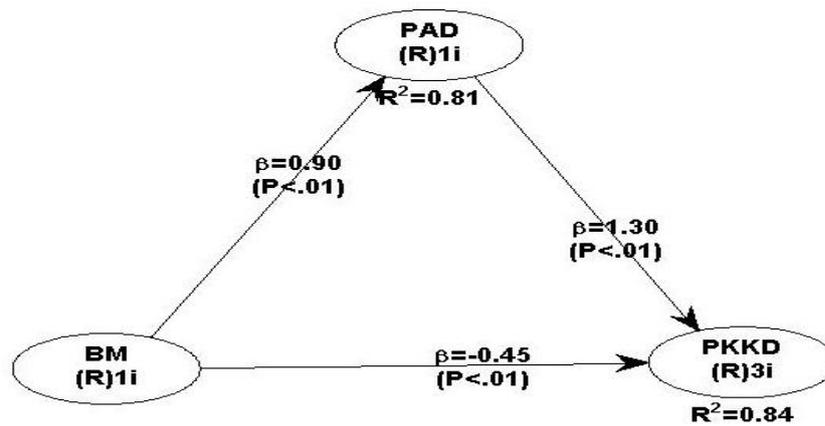
Sumber: data LRA 38 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diolah, 2020



Gambar 3

Struktur Model Akhir Penelitian

Sumber: data LRA 38 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diolah, 2020



Gambar 4
Hasil Inner Model

Sumber: data LRA 38 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diolah, 2020

Tabel 6
Hasil Pengujian Laten Variable Coefficients

	BM	PAD	PKKD
<i>R-squared</i>		0.805	0.841
<i>Adjusted R-squared</i>		0.804	0.839
<i>Q-squared</i>		0.801	0.839

Sumber: data LRA 38 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diolah, 2020

Pengujian Model Fit

Pengujian model fit dalam PLS digunakan untuk menemukan suatu model yang fit dengan data originalnya sehingga dapat menemukan kualitas model. Dalam penelitian ini ukuran fit model yang digunakan hanyalah lima ukuran yaitu *Average Path Coefficient* (APC), *Average R-squared* (ARS), *Average Adjusted R-squared* (AARS), dan *Average Block Variance Inflation* (AVIF).

APC, ARS, dan AARS digunakan untuk mengukur rata-rata nilai path koefisien, R-squared, dan Adjusted R-squared yang dihasilkan dalam model. Nilai P-values untuk APC, ARS, dan AARS yang direkomendasikan ≤ 0.05 . Sedangkan untuk AVIF digunakan untuk menguji masalah collinearity di dalam model PLS. Nilai AVIF dan AFVIF yang direkomendasikan harus ≤ 3.3 namun ≤ 5.5 masih dapat diterima (Ghozali dan Latan, 2017:95). Adapun hasil model fit penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Model Fit

Ukuran	Nilai
Average Path Coefficient (APC)	0.880, P<0.001
Average R-squared (ARS)	0.823, P<0.001
Average Adjusted R-squared (AARS)	0.822, P<0.001
Average Block Variance Inflation (AVIF)	5.314

Sumber: data LRA 38 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diolah, 2020

Hasil pengujian model fit menunjukkan bahwa nilai APC, ARS, dan AARS memiliki P-values dibawah 0.05 dan AVIF memiliki nilai dibawah 5.5. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian ini baik (sesuai) atau memiliki fit model yang baik.

Pengujian Hipotesis

Dari hasil pengujian inner model atau pengujian model struktural dapat diperoleh nilai koefisien regresi dan signifikansi dari masing-masing hubungan langsung antar variabel penelitian yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang dipilih dalam penelitian ini. Adapun nilai koefisien regresi serta signifikansi hubungan langsung antar variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 8.

Berdasarkan Tabel 8 nilai koefisien regresi hubungan variabel antara variabel Belanja Modal (BM) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.897 dan nilai signifikansi P-values sebesar < 0.001 . Dengan koefisien regresi bernilai positif dan $p\text{-values} < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maksud dari arah positif adalah apabila Belanja Modal semakin naik maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila Belanja Modal menurun maka Pendapatan Asli Daerah menurun. Sehingga berdasarkan hasil tersebut hipotesis Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima.

Besarnya nilai koefisien regresi hubungan variabel antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah (PKKD) sebesar 1.297 dengan nilai signifikansi $P\text{-values} < 0.001$. Koefisien regresi tersebut bernilai positif dan nilai signifikansi dibawah 0.05, hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan arah positif. Dimana semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima maka semakin meningkat pula Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. Dan sebaliknya semakin menurun Pendapatan Asli Daerah yang diterima semakin menurun pula Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. Sehingga hipotesis Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dapat diterima.

Sedangkan nilai koefisien regresi hubungan variabel antara variabel Belanja Modal (BM) dengan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah (PKKD) sebesar -0.447 dengan nilai signifikansi $P\text{-values} < 0.001$. Berbeda dengan hubungan variabel lainnya, hubungan variabel ini bernilai negatif dan nilai signifikansi masih dibawah 0.05, hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan arah negatif. Arah negatif maksudnya ialah semakin meningkat Belanja Modal yang dikeluarkan maka semakin menurun Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. Begitu pula sebaliknya semakin menurun Belanja Modal yang dikeluarkan maka semakin meningkat Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. Oleh karena itu hipotesis Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah tidak dapat diterima.

Tabel 8
Nilai Koefisien Regresi Antar Variabel

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Regresi	P-values
Belanja Modal - Pendapatan Asli Daerah	0.897	<0.001
Pendapatan Asli Daerah - Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah	1.297	<0.001
Belanja Modal - Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah	-0.447	<0.001

Sumber: data LRA 38 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 diolah, 2020

Selain menguji pengaruh langsung antar variabel, penelitian ini juga menguji ada atau tidaknya efek mediasi. Pengujian pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening dilakukan dengan melakukan estimasi *indirect effect* serta harus memenuhi beberapa syarat yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara variabel prediktor dengan mediator, mediator dengan criterion, dan prediktor dengan criterion. Setelah memenuhi syarat tersebut maka dilanjutkan dengan menghitung *Variance Accounted For* (VAF). Adapun nilai VAF dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{VAF} = \frac{0.897 \times 1.297}{0.897 \times 1.297 + (-0.447)} \times 100\%$$

$$\text{VAF} = 162,39\%$$

Nilai VAF sebesar 162,39% atau diatas 80% menunjukkan bahwa variabel intervening atau mediasi penelitian ini memiliki pengaruh yang besar atau dapat dikatakan sebagai mediasi penuh.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.897 dengan nilai *P-values* < 0.001. Hal ini berarti bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan arah pengaruh positif atau searah. Sehingga menurut hasil penelitian peningkatan Belanja Modal akan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pun sebaliknya penurunan Belanja Modal akan mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu H_1 yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diterima.

Sejalan dengan hasil penelitian Amrozi (2016), Nugroho dan Rohman (2012) yang menghasilkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan dengan adanya Belanja Modal berupa pembangunan infrastruktur dapat memicu terjadinya aktivitas masyarakat sehingga memperluas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan akhirnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan infrastruktur yang tepat mampu menjadikan suatu daerah memiliki daya tarik tertentu terhadap investor agar menginvestasikan modalnya di daerah tersebut. Kemudahan akses yang merupakan hasil dari pembangunan inilah faktor utama para investor tertarik untuk melakukan penanaman modal di daerah tersebut.

Selain itu pengeluaran Belanja Modal juga berdampak pada periode yang akan datang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Darwanis dan Saputra (2014) dimana variabel Belanja Modal yang digunakan yaitu data rentang waktu 2008-2011 sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah menggunakan data rentang waktu 2009-2012. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Belanja Modal yang merupakan cerminan dari pembangunan, baru dapat dinikmati atau dirasakan efeknya ketika pembangunan tersebut sudah selesai. Adapun jangka waktu pembangunan ini dalam praktiknya memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang melewati tahun atau jangka panjang, ada pula yang selesai pada tahun berjalan atau jangka pendek. Sehingga Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya dapat dirasakan manfaatnya pada tahun berjalan saja namun juga pada periode berikutnya.

Hal yang perlu diperhatikan ialah Belanja Modal yang dikeluarkan harus benar-benar tepat guna, memberikan manfaat, dan demi kesejahteraan masyarakat semata. Pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana harus didasari dengan tujuan

mensejahterakan rakyat. Dengan begitu masyarakat akan terpacu untuk meningkatkan produktivitasnya dan investor akan tertarik untuk membuka lapangan pekerjaan baru sehingga memunculkan sumber sumber pendapatan asli daerah yang baru. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai dan kemandirian suatu daerah dapat ditingkatkan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan hasil pengujian dengan nilai *P-values* < 0,001 dan koefisien regresi sebesar 1,297. Dengan demikian H₂ yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah diterima. Nilai koefisien regresi positif ini menggambarkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah searah, atau dengan kata lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima maka semakin meningkat pula Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. Begitu pula sebaliknya, semakin menurun Pendapatan Asli Daerah yang diterima semakin menurun pula Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah.

Untuk penelitian ini, Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah pada awal penelitian direfleksikan oleh enam rasio yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Dari keenam rasio hanya tiga rasio saja yang lolos uji Validitas Konvergen atau uji loading yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Ketiga rasio tersebut dalam penelitian ini mampu merefleksikan variabel Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan validitas serta reliabilitas yang memenuhi syarat. Sehingga dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Sejalan dengan penelitian Amrozi (2016) Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari Rasio Kemandirian dan Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah.

Selain itu pengujian ini juga memberikan indikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2014-2018 memberikan kontribusi terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. Semakin meningkat jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan semakin meningkat pula kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri segala pengeluarannya. Dengan begitu kemandirian suatu daerah akan tercapai dan akan berdampak pada pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Antari dan Sedana (2018) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah melalui peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat melalui peningkatan pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan mencari sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Semakin banyak sumber-sumber penerimaan baru yang diperoleh, semakin luas pula basis penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Perluasan basis penerimaan ini nantinya mampu mendongkrak penerimaan yang diperoleh suatu daerah yang berdampak pada meningkatnya kinerja penerimaan suatu daerah. Peningkatan Kinerja Penerimaan inilah salah satu faktor pemicu meningkatnya Pertumbuhan Kinerja Keuangan suatu Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Darwanis dan Saputra (2014) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Peningkatan pengawasan serta penelitian terhadap pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan melakukan pengawasan yang baik terhadap pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah tidak akan mengalami kehilangan sumber penerimaan atau penurunan penerimaan yang diakibatkan oleh lalainya subjek penerimaan daerah karena Pemerintah Daerah telah memberikan himbuan atau peringatan akan kewajiban pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah. Selain itu penelitian akan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayarkan apakah sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna menjaga penerimaan daerah. Sehingga dengan kegiatan tersebut Pendapatan Asli Daerah tetap terjaga, terhindar dari penurunan dan bahkan meningkat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan-kegiatan tersebut dapat berdampak pada meningkatnya Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah

Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan hasil pengujian penelitian ini. Hasil pengujian penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan daerah memiliki *P-values* < 0,001 yang berarti bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. Hasil pengujian juga menyatakan bahwa besaran koefisien hubungan Variabel Belanja Modal terhadap Variabel Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah sebesar -0.447. Nilai koefisien minus ini menggambarkan bahwa Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan memiliki arah yang berlawanan. Hal ini berarti, meningkatnya Belanja Modal yang dikeluarkan mengakibatkan penurunan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. Pun sebaliknya, menurunnya Belanja Modal yang dikeluarkan mengakibatkan peningkatan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah.

Hasil pengaruh negatif antara Belanja Modal dengan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah ini mengindikasikan bahwa Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur selama periode 2014-2018 berkontribusi negatif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur selama periode 2014-2018. Dimana Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah ini direfleksikan oleh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Belanja modal yang dikeluarkan suatu daerah untuk pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana yang tidak mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yang baru inilah yang menyebabkan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah menurun. Selain itu mutu dan kualitas hasil dari Belanja Modal yang dikeluarkan oleh suatu daerah yang jauh dari yang diinginkan masyarakat juga mampu memicu terjadinya penurunan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. Investor akan kecewa akan hasil infrastruktur yang dihasilkan ternyata jauh dari mutu atau kualitas yang dibutuhkan sehingga proses penanaman modal akan terganggu dimana hal tersebut mampu memicu Pertumbuhan Kinerja Keuangan suatu Daerah. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Antari dan Sedana (2018) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Berbeda dengan penelitian Arini dan Kusuma (2019) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia fenomena pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah ekonomi eksklusif yaitu akibat pembangunan yang dilakukan tidak berkualitas atau belum merata. Belum meratanya pembangunan antar satu wilayah dengan wilayah yang lain menyebabkan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah tidak dapat meningkat. Serta berbeda dengan hasil pengujian Astiti dan Mimba (2016) yang menyatakan bahwa Belanja Modal

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan daerah dengan nilai positif. Hal tersebut dikarenakan Belanja Modal yang tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengalokasian Belanja Modal untuk pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan sumber-sumber keuangan mampu memberikan nilai tambah bagi kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada analisa data, pengujian hipotesis serta pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan arah positif. Belanja Modal berupa pembangunan infrastruktur dapat memicu terjadinya aktivitas masyarakat sehingga memperluas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan akhirnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan infrastruktur yang tepat mampu menjadikan suatu daerah memiliki daya tarik tertentu terhadap investor agar menginvestasikan modalnya di daerah tersebut. Kemudahan akses yang merupakan hasil dari pembangunan inilah faktor utama para investor tertarik untuk melakukan penanaman modal di daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nugroho dan Rohman (2012) serta Darwanis dan Saputra (2014). (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan arah positif. Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan semakin meningkat pula kemandirian daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari kegiatan perluasan basis penerimaan dan pengawasan serta penelitian pembayaran pajak daerah atau retirbusi daerah mampu menjaga dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antari dan Sedana (2018). (3) Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan arah negatif. Belanja modal yang dikeluarkan suatu daerah untuk pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana yang tidak mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yang baru menyebabkan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antari dan Sedana (2018)..

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur untuk lebih memperhatikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan perluasan basis penerimaan serta melakukan pengawasan dan penelitian lebih mendalam, serta memperhatikan penggunaan belanja modal agar lebih tepat guna mendukung pertumbuhan kinerja keuangan daerah demi tercapainya kemandirian suatu daerah. (2) Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan indikator dari variabel Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan menggunakan rasio lainnya agar lebih merefleksikan kondisi Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah, selain itu menambahkan informasi besaran jumlah Belanja Modal yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengetahui porsi kegiatan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Amrozi, A. I. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada

- Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 1(1): 2502-3764
- Antari, N. P. G. S., dan I. B. P. Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(2): 1080-1110.
- Arif, B., Muchlis, dan Iskandar. 2010. *Akuntansi Pemerintah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Arini, P. R., dan M. W. Kusuma. 2019. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta di Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*. 5(1): 28-38
- Astiti, D. N. Y., dan N. P. S. H. Mimba. 2016. Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud* 14.3: 1924-1950.
- Darwanis, dan R. Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 1(2):183-199
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariante Dengan Program IBM SPSS 21*. Cetakan Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I dan H. Latan. 2017. *Partial Least Squares: Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPls 5.0*. Cetakan Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta
- Nugroho, Fajar dan A. Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*,1(2):1-14
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah. 6 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta
- Sarmanu. 2017. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*. Airlangga University Press. Surabaya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.